

Pemberdayaan Desa dalam Bayang-Bayang Krisis Ekologis (*Studi Kasus: Desa Ponggok, Kabupaten Klaten sebagai Desa Wisata*)

Natasya Aisya Putri ^{1*}

¹*Independent Researcher, Indonesia*

**Corresponding Author: pnastasyaaisya@gmail.com*

Abstrack

This study analyzes the dynamics of community empowerment in environmental governance in Ponggok Village, Klaten Regency, by highlighting the structural and political challenges in efforts to build sustainability from and for the community. Although Ponggok is known as a tourist village that has succeeded in mobilizing community participation in environmental preservation, Ponggok Village has not yet found a bright spot. The analytical approach refers to the theory of community empowerment, political ecology, and local-based sustainability. This study uses a Qualitative approach with case studies. The results of this study indicate that environmental programs in Ponggok are often ad-hoc, dependent on central figures, and have not been integrated into long-term policies. The absence of a supportive institutional framework makes community participation vulnerable and unsustainable. This study emphasizes the importance of reformulating the empowerment approach that is not only participatory, but also transformational, by recognizing local knowledge and expanding decision-making space at the village level.

Keywords: *Community Empowerment, Political Ecology, Environmental Governance*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola lingkungan di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, dengan menyoroti tantangan struktural dan politis dalam upaya membangun keberlanjutan dari dan untuk masyarakat. Meskipun Desa Ponggok dikenal sebagai desa wisata yang berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat, akan tetapi dalam pelestarian lingkungan Desa Ponggok masih belum menemukan titik terang. Pendekatan analisis mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat, ekologi politik, dan keberlanjutan berbasis lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan studi kasus. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program-program lingkungan di Desa Ponggok kerap bersifat ad-hoc, bergantung pada figur sentral, dan belum terintegrasi dalam kebijakan jangka panjang. Ketidakhadiran kerangka kelembagaan yang mendukung menjadikan partisipasi masyarakat rentan dan tidak berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga transformasional, dengan mengakui pengetahuan lokal dan memperluas ruang pengambilan keputusan di tingkat desa.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Ekologi Politik, Tata kelola Lingkungan

Riwayat Artikel: Dikirimkan: 14 Juni 2025 | Direvisi: 31 Juli 2025 | Diterima: 31 Juli 2025



PENDAHULUAN

Desa Ponggok, yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dikenal sebagai salah satu desa maju yang bergerak pada bidang wisata berbasis komunitas di Indonesia. Kemajuan ini dikarenakan pemanfaatan potensi sumber daya alam berupa mata air dan lingkungan yang masih asri. Pemerintah desa berhasil memanfaatkan dan mengembangkan aset desa. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, serta transformasi identitas desa (Putri et al., 2021). Perubahan identitas desa; dari desa yang dikategorikan desa di bawah garis kemiskinan dan tertinggal (Priharjanto & Andriana, 2021) menjadi desa yang mandiri dan desa maju. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak yang ada di Desa Ponggok. Bukan hanya pemerintah desa, tetapi juga kelompok aktor masyarakat serta pihak ketiga seperti pihak akademisi dan pihak swasta, yang terlibat dalam reformasi dan pengembangan desa (Putri et al., 2021).

Jika ditinjau lebih lanjut melalui perspektif *good governance*, masing-masing kelompok aktor menunjukkan sinergisitas antar kelembagaan yang stabil dan memiliki kontribusi yang merata. Pemerintah desa menjadi fasilitator sekaligus inovator, masyarakat menjadi subjek aktif, sementara aktor eksternal hadir sebagai penghubung gagasan dan sumber daya. Namun, di balik narasi sukses ini, terdapat tantangan mendasar dalam hal keberlanjutan dan konsistensi tata kelola, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana desa memanfaatkan aset alam yaitu air sebagai aset utama dalam pariwisata.

Keberhasilan ekonomi tersebut menghadirkan tantangan baru terutama dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Tantangan ini menghasilkan tekanan ekologis yang semakin hari justru semakin meningkat. Meningkatnya produksi sampah, eksploitasi air dan degradasi lingkungan, pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin relevan dan mendesak. Hal ini dikarenakan, masyarakat sebagai aktor utama dalam menerima dan memanfaatkan aset yang ada di desa (Enggraini et al., 2020). Ditinjau lebih jauh, desa juga dituntut untuk mengembangkan kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana pemerintah desa mengartikulasikan pemberdayaan masyarakat dalam konteks ekologi, dan bagaimana aktor-aktor lokal terlibat dalam upaya tersebut baik sebagai pelaksana, penggerak, maupun penerima manfaat.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan menghasilkan kesadaran masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi tambahan. Hal ini dikemukakan oleh Islami dan Suyuti (2021) dalam kajian yang melihat pendekatan edukasi melalui media digital mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Hal yang serupa juga ditemukan oleh Maasi (2024) bahwa pengolahan sampah berbasis ekonomi kreatif berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa di Gorontalo. Studi Sartika (2021) juga menegaskan pentingnya lembaga seperti TPST 3R dan Bank Sampah sebagai sarana pemberdayaan lingkungan yang berkelanjutan. Sayangnya, banyak dari inisiatif tersebut menghadapi kendala, salah satunya kelembagaan dan partisipasi yang rendah, hal ini disampaikan oleh Pangestu (2022) dalam penelitiannya bahwa rendahnya partisipasi masyarakat akibat dari lemahnya infrastruktur dan minimnya kesadaran. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program

pemberdayaan tidak hanya bergantung pada niat baik dan program inovatif, tetapi juga pada struktur kelembagaan yang mendukung dan kesinambungan program dalam jangka panjang.

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah bagaimana pemerintah Desa Ponggok mengartikulasikan dan mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat dalam konteks ekologi, serta bagaimana berbagai aktor lokal berperan dalam proses tersebut. Dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pemberdayaan berbasis masyarakat yang menekankan bahwa ini penting dilakukan untuk mengendalikan proses pembangunan yang memengaruhi kehidupan masyarakat (Chambers, 1997; Korten, 1987). Alih-alih menjadi penerima pasif, masyarakat dipandang sebagai agen aktif yang mampu mengidentifikasi masalah, mengusulkan solusi, dan mengelola sumber daya lokal secara kolektif. Selanjutnya, Grassroots Sustainability, yang menantang model teknokratis dan menyoroti kehidupan lokal sebagai komponen penting tata kelola lingkungan (Auturo, 1998). Dan terakhir, Ekologi Politik sebagai pemahaman bahwa bagaimana hubungan kekuasaan membentuk akses dan kendali atas sumber daya alam (Foster et al., 2010). Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya memahami kompleksitas aktor, serta aspek-aspek sosial-politik dan kelembagaan yang mempengaruhi keberlanjutan program pemberdayaan berbasis lingkungan di Desa Ponggok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Ponggok karena karakteristiknya sebagai desa wisata yang berhasil memanfaatkan sumber daya air dan memiliki sejarah inisiatif komunitas dalam pengelolaan lingkungan. Objek penelitian pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa Ponggok, BUMDes Tirta Mandiri, serta masyarakat di masing-masing RW di Desa Ponggok. Data dikumpulkan dengan wawancara semi-struktural, observasi lapangan serta studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan desain studi kasus agar dapat memahami secara mendalam proses pemberdayaan masyarakat dalam konteks ekologi di desa wisata yaitu Desa Ponggok. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi relasi antar aktor, dinamika kelembagaan, serta praktik dan narasi lokal yang tidak dapat dijelaskan melalui data kuantitatif semata.

Beberapa konsep kunci didefinisikan secara operasional untuk memperjelas ruang lingkup analisis dan mempermudah penafsiran data. *Pemberdayaan masyarakat* dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengontrol arah pembangunan serta pengelolaan lingkungan hidup mereka sendiri. Proses ini mencakup partisipasi aktif, penguatan kapasitas lokal, dan transformasi peran masyarakat dari penerima pasif menjadi agen perubahan. Sementara itu, *pemberdayaan ekologi* mengacu pada upaya kolektif yang dilakukan oleh komunitas untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam melalui tindakan partisipatif dan peningkatan kesadaran ekologis. Ini mencakup praktik-praktik lokal yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti pengelolaan sampah, konservasi air, serta pendidikan lingkungan berbasis komunitas. Adapun *aktor lokal* dalam konteks ini mencakup individu atau kelompok masyarakat yang berada di tingkat desa, termasuk aparat desa, komunitas warga, penggerak lingkungan, dan mitra eksternal yang berperan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program berbasis lingkungan.

Untuk mendukung proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa alat utama, yaitu pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali narasi dari para aktor lokal, catatan observasi lapangan untuk menangkap dinamika sosial dan praktik sehari-hari masyarakat, serta perangkat dokumentasi berupa kamera dan perekam suara guna merekam interaksi dan peristiwa kunci secara visual dan auditif. Bahan pendukung lainnya

meliputi dokumen resmi desa dan publikasi komunitas lokal yang menyediakan konteks tambahan dalam memahami kerangka kerja dan narasi kebijakan desa.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan *analisis tematik* dengan melakukan transkrip menyeluruh atas wawancara dan catatan observasi lapangan. Setelah itu, informan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Analisis ini dilakukan secara manual dan dihubungkan dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yaitu, pemikiran *pemberdayaan berbasis komunitas* (Chambers, 1997; Korten, 1987), *grassroots sustainability* (Auturo, 1998), dan *ekologi politik* (Foster et al., 2010). Untuk memastikan kekuatan data, peneliti menggunakan pendekatan etnografi dengan pencocokan validasi silang dengan keterlibatan langsung di lapangan yaitu Desa Ponggok. Melakukan observasi lapangan, menetap beberapa minggu di lapangan serta interaksi dalam forum desa dan kelompok eksternal desa. Melalui teknik ini, data dari berbagai sumber dan metode yang dipadukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan reflektif terhadap praktik keberlanjutan berbasis komunitas di Desa Ponggok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pemberdayaan Terartikulasi: Memahami Tata Kelola Lingkungan Berbasis Masyarakat di Ponggok

Desa Ponggok, yang kerap disebut sebagai desa wisata percontohan di Indonesia karena keberhasilannya mengelola sumber daya air sebagai basis ekonomi lokal, menyimpan kompleksitas sosial-ekologis yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Ketika keberhasilan ekonomi menjadi wajah yang dominan, dinamika tata kelola lingkungan dan praktik pemberdayaan masyarakat justru menampilkan ketegangan antara antusiasme komunitas, struktur kelembagaan yang rapuh, dan fragmentasi spasial dalam pelaksanaan program. Hal ini disampaikan oleh Andra, dalam kutipan wawancara di bawah ini :

“...kebijakan yang akan dihadirkan masih belum bersifat peraturan desa. Akan tetap setiap bulannya kades dan ketua RT berkumpul untuk membahas masalah yang ada, termasuk masalah sampah...” (wawancara langsung dengan Andra pada Agustus 2024)

Jika dilihat dari kutipan wawancara di atas, belum hadirnya kebijakan formal dalam bentuk peraturan desa yang mengatur spesifik tentang keadaan lingkungan akan tetapi pemerintah desa memperlihatkan upaya deliberatif melalui forum musyawarah antar kepala desa dan ketua RT. Jika diperhatikan ini memperlihatkan bagaimana adanya ruang partisipatif yang berbasis pada musyawarah, dalam konteks lokal sebagai bentuk *governance* yang tidak selalu terlembaga secara normatif, tetapi jika ditinjau secara informal terdapat struktur sosial yang ada. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Bank Sampah:

“sayangnya ini masih belum diterapkan, saya sendiri masih belajar serta peserta yang sedikit. Ini hanya hadiah. Bank sampah ini juga bentuk uji coba pemerintah desa karena di RW kami ketua RW nya sangat aktif dan turun langsung kepada masyarakat berbeda dengan wilayah dusun lainnya, ini juga bersifat kolektif dan bank sampah ini hanya dibuka 2 kali dalam seminggu “ (Endang, Ketua Bank Sampah, Wawancara; 8 November 2023)

Selain itu, ada berbagai kelompok aktor yang digandeng dalam tata kelola lingkungan yang ada di Desa Ponggok.

“Itu pengelolaan air yang ada di keliling sini kan dibawah yayasan pusur institut. Untuk kita berkolaborasi. Jadi banyak lembaga yang kita ngandeng untuk berkolaborasi. Bukan cuma swasta, jadi LSM-nya juga kita ngandeng juga.” (Junaedhi, Kepala Desa Ponggok, wawancara, 12 Desember 2023).

Dari kutipan-kutipan wawancara di atas, persoalan tata kelola lingkungan tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan, kelembagaan dan konfigurasi sosial-politik di tingkat desa. Munculnya ruang kekuasaan informal yang khas di Desa Ponggok memperlihatkan bahwa ini merupakan situs pengambilan keputusan, tetapi tidak memiliki akuntabilitas formal dan justru seringkali mengukuhkan dominasi elit lokal. Peran kepala desa dan ketua RT sebagai aktor formal dan informal sekaligus mencerminkan ambivalensi tata kelola, di mana komunitas secara kasat mata dilibatkan, tetapi dalam praktiknya tetap tergantung pada kehendak dan agenda pemegang kuasa lokal.

Keadaan tersebut menjadi wadah demokratisasi lingkungan yang berforum informal justru memproduksi hierarki sosial Dimana dalam studi kasus desa Ponggok, yang memiliki kapital alam yang tinggi menghasilkan tentang control terhadap sumber daya strategis: siapa yang menentukan prioritas lingkungan ? siapa yang harus menanggung beban ekologis dari ketidakteraturan sistem tata kelola lingkungan di Desa ? di mana masyarakat hanya menjadi objek dalam kebijakan bukan subjek yang menentukan arah kebijakan.

Ekologi politik memberikan ruang praktik pemberdayaan yang terjadi di Ponggok dapat dipahami sebagai bentuk "pemberdayaan terartikulasi" yakni serangkaian proses yang muncul melalui pertemuan aktor-aktor dengan kapasitas, kepentingan, dan posisi sosial yang berbeda. Artikulasi ini tidak selalu bersifat harmonis atau sistematis, melainkan sering kali bersifat ad-hoc, sporadis, dan bersandar pada relasi informal antarindividu maupun kelompok. Pemerintah desa, meskipun menjadi aktor sentral, tidak memiliki unit khusus atau struktur kelembagaan yang secara eksplisit menangani isu lingkungan secara komprehensif. Akibatnya, pelaksanaan program lingkungan sangat bergantung pada konteks, momentum, dan figur individu tertentu, bukan pada sistem kelembagaan yang mapan.

“kami mulai kegiatan dengan GLC, sebagai salah satu bentuk awal dari sosialisasi kami terhadap masyarakat. Program ini disambut hangat masyarakat. Pesertanya banyak. Kegiatan dilakukan dalam beberapa hari. Tapi memang dokumen nya tidak begitu ada karena itu manual. “ (Laskar, Kepala Kesejahteraan Desa, wawancara; 8 November 2023)

Hal ini juga dikonfirmasi kembali oleh Junaedhi (Kepala Desa) dalam kutipan wawancara berikut:

“ bentuk keseriusan kami terhadap menjaga lingkungan dan sumber air kami yaitu GLC yang merupakan kegiatan sosialisasi awalnya itu sangat tidak menarik perhatian masyarakat. Sehingga 2019 muncul kegiatan yang mengundang presenter yaitu Nadine Chandrawinata. Biayanya fantastis tapi kegiatannya sukses, maksud dari sukses ini antusias masyarakat desa ya mbak. Kegiatan berisikan sosialisasi, sampah ada juga, air terutama.” (Junaedhi, Kepala Desa, wawancara; 4 November 2023)

Program seperti *Green Literature Camp (GLC)* menjadi studi kasus yang mencerminkan dinamika tersebut. Diluncurkan sebagai inisiatif berbasis literasi lingkungan, GLC awalnya disambut dengan antusias oleh warga, terutama generasi muda dan pendidik lokal. Kegiatan ini menggabungkan pendekatan edukatif melalui diskusi, membaca, dan lokakarya kolaboratif yang bertujuan meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat. Namun, antusiasme awal itu tidak cukup untuk mempertahankan keberlanjutan program. GLC gagal dilembagakan ke dalam struktur formal desa, tidak memiliki tim pelaksana tetap, sumber daya pendukung, maupun perencanaan jangka panjang. GLC pun berhenti sebagai inisiatif satu kali, menunjukkan bahwa inisiatif yang menggugah sekalipun akan mudah hilang ketika tidak memiliki penopang struktural. Hal ini sesuai dengan kritik Korten (1987) bahwa pemberdayaan tanpa dukungan institusional hanya akan menjadi fenomena permukaan.

Hal serupa juga tampak dalam implementasi bank sampah di desa Ponggok. Meski program ini memiliki potensi besar dalam mengelola sampah rumah tangga dan mendukung ekonomi sirkular, kenyataannya keberadaan bank sampah hanya terdapat di salah satu wilayah RW. Ini menandakan adanya fragmentasi spasial dalam pelaksanaan program lingkungan. Pemberdayaan tidak menjangkau seluruh wilayah desa, dan akses terhadap fasilitas lingkungan hanya tersedia bagi warga di lokasi tertentu. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa keberdayaan di Ponggok tidak bersifat kolektif atau merata, melainkan terbatas pada wilayah-wilayah yang dianggap lebih siap, lebih dekat secara sosial-politik dengan aparat desa, atau memiliki kapasitas lebih besar dalam hal sumber daya manusia.

Dari perspektif sosial, partisipasi warga juga menunjukkan pola yang tidak setara. Perempuan, misalnya, menjadi aktor utama dalam praktik pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam banyak rumah tangga, sampah dikaitkan dengan aktivitas domestik; memasak, membersihkan, dan membuang limbah yang secara sosial dianggap sebagai domain perempuan. Perempuan pun menjadi agen penting dalam manajemen sampah, terutama dalam memilah, menyimpan, atau bahkan membakar sampah. Namun, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan desa sangat minim. Perempuan mungkin diundang dalam musyawarah, tetapi tidak menjadi bagian dari proses deliberatif yang menentukan arah kebijakan. Ini mencerminkan ketimpangan gender yang struktural, di mana beban ekologis rumah tangga tidak diimbangi dengan kekuasaan representatif dalam politik lokal.

Lebih jauh, praktik membakar sampah yang masih lazim dilakukan menjadi simbol dari lemahnya sistem pengelolaan sampah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembakaran bukan sekadar aktivitas fungsional, tetapi juga merupakan bentuk respons warga terhadap absennya sistem yang layak. Dalam hal ini, praktik tersebut memperlihatkan kegagalan kelembagaan untuk menyediakan opsi alternatif yang dapat diakses oleh seluruh warga. Warga tidak memiliki pilihan selain membakar sampah sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) dalam konteks infrastruktur yang terbatas. Ini juga menegaskan bahwa kesadaran ekologis tidak bisa tumbuh secara ideal tanpa dukungan struktural berupa sistem pengelolaan, edukasi, dan insentif.

Selain itu, pendekatan pembangunan lingkungan yang dijalankan pemerintah desa menunjukkan gejala pragmatisme ekologis. Isu lingkungan sering kali dibingkai dalam konteks pendukung sektor wisata bukan sebagai persoalan ekologis yang berdiri sendiri. Dalam berbagai dokumen maupun wawancara dengan perangkat desa, pelestarian sumber daya alam lebih sering disebut dalam kaitannya dengan keberlangsungan pariwisata ketimbang sebagai komitmen jangka panjang untuk menjaga keseimbangan sosial-ekologis. Pendekatan ini memperlihatkan reduksi terhadap persoalan lingkungan menjadi isu teknokratik, yang dikelola melalui proyek-proyek dan kegiatan jangka pendek, bukan melalui refleksi kritis atas relasi manusia dan alam.

Dalam konteks ini, pemberdayaan lingkungan yang terjadi di Ponggok menunjukkan adanya keterputusan antara prakarsa mikro dan kerangka kelembagaan makro. Banyak inisiatif muncul dari komunitas baik itu guru, pemuda, atau relawan lingkungan namun tidak memiliki saluran formal untuk menopang atau mengembangkan inisiatif tersebut. Hal ini menyebabkan prakarsa-prakarsa tersebut menjadi rapuh dan bergantung pada aktor individual yang bersifat temporer. Tidak adanya sistem dokumentasi kelembagaan dan alih pengetahuan antargenerasi membuat pelajaran berharga dari satu program tidak dilanjutkan atau direplikasi. Ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana memori kelembagaan dan pengalaman kolektif dipertahankan dalam tata kelola berbasis masyarakat?

Aspek lain yang tidak bisa diabaikan adalah cara pemerintah desa secara tidak sadar menciptakan klasifikasi spasial terhadap wilayah-wilayah di dalam desa. Wilayah yang dianggap strategis atau memiliki potensi ekonomi lebih besar biasanya mendapat perhatian lebih dalam program lingkungan. Hal ini menyebabkan terjadinya peminggiran terhadap wilayah-wilayah yang dianggap kurang produktif secara ekonomi. Padahal, dalam perspektif keadilan ekologis, setiap warga berhak atas akses dan perlindungan lingkungan yang setara, terlepas dari posisi geografis atau kontribusinya terhadap pendapatan desa.

Pada akhirnya, pemberdayaan lingkungan di Ponggok tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kisah sukses. Ia harus dibaca sebagai lanskap relasi kuasa, struktur kelembagaan, dan konfigurasi sosial yang kompleks. Praktik pemberdayaan yang terjadi mengandung ketegangan antara semangat komunitas dan keterbatasan struktural; antara partisipasi simbolik dan eksklusi yang tersembunyi; antara keberlanjutan yang diklaim dan keberlanjutan yang dijalankan. Dalam konteks seperti ini, pemberdayaan menjadi medan artikulasi yang dinamis—bukan entitas yang tetap atau tunggal. Dengan menyoroti bagaimana praktik-praktik ini berlangsung dan bagaimana ia dibatasi oleh kondisi struktural, kita dapat melihat bahwa keberdayaan yang sejati tidak bisa hanya mengandalkan retorika atau program jangka pendek. Ia membutuhkan sistem yang memungkinkan warga untuk tidak hanya menjadi partisipan, tetapi juga pengambil keputusan; tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga perancang masa depan ekologis mereka sendiri.

b. Menuju Masa Depan Keberlanjutan : Sebuah Refleksi Krisis

Desa Ponggok sering ditampilkan sebagai model inovasi pedesaan di Indonesia yang bertransformasi dari desa miskin menjadi destinasi wisata alam yang berkembang pesat dengan berbasis air. Sayangnya, dibalik kisah sukses ini terdapat gambaran yang lebih kompleks dan ambivalen yang dilihat dari lensa keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan akar rumput (masyarakat). Pencapaian ekonomi di desa sangat fantastic akan tetapi pemberdayaan masyarakat dalam memperhatikan dan menjaga lingkungan relative rendah dan terfragmentasi secara structural. Kesenjangan ini menunjukkan ketegangan kritis antara tujuan pembangunan dan keharusan ekologis.

Salah satu contoh penting dari kontradiksi ini adalah program *Green Literature Camp (GLC)*. Program ini awalnya merupakan inisiatif yang menarik karena menggabungkan pendekatan literasi dengan kesadaran lingkungan. Respons masyarakat cukup positif, terutama dari kalangan muda. Namun, program ini tidak berlanjut karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah desa dan tidak ada upaya untuk melembagakan program ini ke dalam struktur kelembagaan lokal. Situasi ini mencerminkan kekuatan argumen Korten (1987), bahwa pemberdayaan tanpa dukungan institusi yang berkelanjutan cenderung bersifat dangkal dan tidak bertahan lama. Program yang hanya bergantung pada antusiasme awal atau tokoh tertentu akan rentan menghilang jika tidak ada dukungan sistemik. Lebih lanjut, ini mencerminkan tren

yang lebih luas dalam banyak inisiatif pembangunan pedesaan, di mana partisipasi masyarakat diperlakukan sebagai tambahan simbolis alih-alih prinsip struktural tata kelola.

Keterbatasan retorika partisipatif dalam proses pengambilan keputusan di desa Ponggok semakin terungkap, walaupun beberapa inisiatif lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat seperti: bank sampah dan gotong royong, sayangnya banyak kegiatan yang bergantung pada individu tertentu, seperti kepala desa atau tokoh masyarakat yang antusias. Kekuasaan tidak terdistribusi secara merata sebaliknya partisipasi dimediasi melalui struktur hierarkis. Hal ini sejalan dengan kritik ekologi politik, Foster dkk (2010) bahwa pembangunan partisipatif bisa menjadi semu jika tidak ada distribusi kekuasaan yang merata. Lebih jauh, pendekatan pembangunan di Ponggok masih dominan melihat isu lingkungan sebagai pelengkap dari proyek-proyek wisata dan ekonomi. Lingkungan cenderung dibingkai sebagai aset yang harus dijaga untuk mendukung citra desa wisata, bukan sebagai sistem ekologi yang kompleks dan perlu dijaga untuk kepentingan jangka panjang. Dalam banyak pertemuan, narasi soal pelestarian alam tidak muncul sebagai prioritas utama kecuali jika berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi. Akibatnya, pendekatan keberlanjutan yang dijalankan menjadi sangat pragmatis dan cenderung mengabaikan kompleksitas sosial-ekologis.

Di Ponggok, bahkan inisiatif akar rumput seringkali dikatalisasi dari atas, bukan muncul secara organik dari masyarakat. Kasus bank sampah menggambarkan asimetri kekuasaan yang nyata di akar rumput. Sebagaimana dalam wawancara dengan pemimpin bank sampah, program tersebut bukanlah inisiatif yang melibatkan seluruh masyarakat, melainkan proyek percontohan yang diinisiasi di wilayah RW tertentu yang ditinjau bagaimana keterlibatan aktif ketua RW setempat dan masyarakat. Walaupun partisipasi masih terbatas dan kegiatan hanya dua kali seminggu kegiatan ini seperti uji coba dari pemerintah desa. Ini menunjukkan kerapuhan inisiatif tetapi juga bagaimana keberlanjutan program bergantung pada Tindakan segelintir aktor, alih-alih menjadi sistem yang dimiliki secara kolektif.

Senada dengan itu, kepala desa memberikan penekanan bagaimana peran kemitraan dengan berbagai lembaga eksternal yaitu LSM untuk memperkuat tata kelola lingkungan. Meskipun kolaborasi semacam itu patut dipuji, kolaborasi tersebut memberikan dua mata pisau yang berbeda. Alih-alih membangun kapasitas internal dan ketahanan kelembagaan, pemerintah desa justru memberikan ruang terhadap aktor eksternal untuk mengisi kesenjangan tata kelola. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikan, keberlanjutan dan perencanaan jangka panjang.

Model konsep keberlanjutan yang diterapkan oleh Desa Ponggok jika ditinjau melalui konsep keberlanjutan Escobar (1998), lebih menekankan nilai instrumental lingkungan. Alam dilestarikan sejauh berkontribusi pada ekonomi pariwisata, alih-alih dinilai sebagai ekosistem yang terintegrasi dan relasional. Pragmatisme ekonomi diterapkan pada pengelolaan lingkungan dalam konsep pembangunan. Ketika musyawarah desa, isu-isu lingkungan jarang diprioritaskan kecuali jika bersinggungan dengan pariwisata atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan. melalui pendekatan utilitarian ini dapat melemahkan pemahaman tata kelola yang berkelanjutan yang lebih holistic dan relasional yang diadvokasi oleh Gerakan lingkungan akar rumput dan dekolonial, selain itu dapat menekankan hubungan instrinsik antara kehidupan masyarakat, pengetahuan lokal dan sistem ekologi.

Hal ini memperlihatkan bahwa inisiatif dalam program-program pembangunan dirancang dengan tujuan jangka pendek, tanpa rencana keberlanjutan atau strategi yang menjamin kelangsungan jangka panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan lingkungan dimaknai sebagai suatu kegiatan tersendiri yang berupa sebuah proyek, alih-alih

sebagai proses soaila-politik dinamis yang membutuhkan pembelajaran berkelanjutan, negosiasi dan perubahan struktural. Chambers (1997) mengingatkan kita bahwa dalam partisipasi harus dimulai dari bawah dan dibangun berdasarkan ketentuan dan realitas kehidupan masyarakat lokal, tidak melalui logika top-down yang bersifat pemaksaan atau hasil yang ditentukan secara eksternal.

Kerapuhan struktural tata kelola lingkungan di Ponggok juga menunjukkan keterbatasan dari yang dimodelkan sebagai model “desa selebriti” yang dipuji karena pencapaian dalam desa inovasi pariwisata alam tetapi infrastruktur kelembagaan dan ekologis masih terbelakang. Visibilitas Ponggok sebagai desa yang sukses bahkan dapat mengaburkan pengabaian sistemik terhadap tata kelola lingkungan. Tanpa refleksi kritis, kasus-kasus seperti itu berisiko menjadi tontonan pembangunan alih-alih model transformasi yang adil dan berkelanjutan.

Situasi ini menunjukkan bagaimana tantangan lingkungan dalam ekologi politik bukan sekedar masalah teknis, tetapi tertanam dalam sebuah relasi kekuasaan, representasi dan ekonomi politik. Prioritas pariwisata atas ketahanan ekologi bukanlah suatu kebetulan: hal ini mencerminkan tren kebijakan yang lebih luas yang mengutamakan indikator ekonomi dan pencapaian daripada keadilan sosial dan lingkungan. hal ini menghasilkan bahwa di Desa Ponggok, lingkungan dikomoditiasi dan partisipasi masyarakat diinstrumentalisasi. Dinamika ini akhirnya melemahkan prospek keberlanjutan jangka panjang dan tata kelola lingkungan yang demokratis. Intinya, keadaan di Desa Ponggok memperlihatkan kebutuhan mendesak akan perubahan dalam konsep dan implementasi keberlanjutan pedesaan. Daripada sistem ad-hoc yang dikomandoi oleh individu atau dipimpin oleh pihak eksternal, hal yang seharusnya ditanamkan adalah komitmen struktural untuk keberlanjutan ke dalam tatanan tata kelola desa melalui pendekatan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan masyarakat dalam konteks ekologi di Desa Ponggok merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan penuh tantangan. Meskipun desa ini dikenal sebagai model keberhasilan pengelolaan wisata berbasis air dan inovasi komunitas, pemberdayaan lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi dalam tata kelola desa. Program seperti Green Literacy Camp mencerminkan inisiatif awal yang menjanjikan, namun tidak berlanjut karena lemahnya kelembagaan, tidak adanya kesinambungan kebijakan, dan ketergantungan pada figur tertentu dalam pemerintahan desa.

Secara teoritis, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan ekologis. Perspektif *grassroots sustainability* mengingatkan kita bahwa keberlanjutan sejati tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan teknokratis, tetapi harus berakar pada pengetahuan lokal dan praktik budaya masyarakat. Sementara itu, kerangka ekologi politik memperlihatkan bagaimana dinamika kekuasaan—baik dalam struktur desa maupun dalam relasi antaraktor—mempengaruhi distribusi sumber daya, arah kebijakan, dan makna dari keberlanjutan itu sendiri.

Dalam menghadapi krisis lingkungan global, pengalaman Ponggok memberi pelajaran penting: bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekologi bukan hanya soal partisipasi administratif, tetapi menyangkut transformasi nilai, struktur, dan cara pandang terhadap relasi manusia dengan alam. Maka dari itu, upaya pelestarian lingkungan di tingkat desa harus dibangun melalui sinergi lintas aktor, penguatan kelembagaan lokal, serta pengakuan atas keberagaman epistemologi dalam memaknai pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auturo, E. (1998). Whose Knowledge, Whose nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movements. *Journal of Political Ecology*, 5(1). <https://doi.org/10.2458/v5i1.21397>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Enggraini, F., Putri, N. C., Salman, Y. A., & Handayani, W. (2020). Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Ponggok-Polanharjo, Klaten. *Matra Pembaruan*, 4(2), 71–82. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82>
- Foster, J. B., Clark, B., & York, R. (Eds.). (2010). *The ecological rift: Capitalism's war on the earth*. Monthly Review Press.
- Islami, P. Y. N., & Suyuti, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Media Youtube (Studi Kasus: Kampung Bengle, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 1(2), 263–274. <https://doi.org/10.54082/jamsi.73>
- Korten, D. C. (1987). *Community management: Asian experience and perspectives*. Kumarian Press.
- Maasi, J. W. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Kreatif Di Gorontalo*. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 8040–8042. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.33584>
- Pangestu, W. E., Cakrawala Nurani, (2022). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Melakukan Pengelolaan Sampah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 4(2), 215–230. <https://doi.org/10.21632/jpmi.4.2.215-230>
- Priharjanto, A., & Andriana, N. (2021). Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Studi Kasus: BumDesa Tirta Mandiri Ponggok. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(2), 158-171. <https://doi.org/10.33603/publika.v9i2.6260>
- Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Peran dan Sinergitas Antar Aktor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Governance. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2), 174-185. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.32107>
- RPJMDes Desa Ponggok*
- Sartika, E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Desa Sukamenak. *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1). <https://doi.org/10.29313/ethos.v9i1.6555>